

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini berisikan simpulan dari penelitian dan saran yang peneliti berikan terkait hasil penelitian. Penelitian berjudul: “Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif *Good Governance* Studi Titik Parkir Wilayah Taman Indonesia Kaya” menghasilkan simpulan atas temuan penelitian sebagai berikut:

#### **4.1 Kesimpulan**

Pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Semarang khususnya di wilayah Taman Indonesia Kaya dalam segi transparansi memang diberikan kemudahan akses namun harus memberikan alasan yang jelas untuk apa data tersebut, Kemudahan akses data masih jauh dari kata sempurna dan terkait pembukuan penerimaan juga masih kurang maksimal karena tidak adanya rekapitulasi setiap jalan yang kemudian cukup membingungkan dalam melakukan pengecekan terhadap realisasi dari penerimaan tersebut. Untuk akuntabilitas semua berjalan sesuai standar operasional prosedur yang ada dan dalam perumusan kebijakan melibatkan banyak *stakeholders*. Tentang partisipasi, Dinas Perhubungan memberikan wadah kepada masyarakat untuk memberikan laporan, tanggapan dan evaluasi. Masih ditemuinya masyarakat yang enggan membayar retribusi menjadi pekerjaan selanjutnya bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan Taman Indonesia Kaya yaitu mangkirnya Juru Parkir dalam membayar setoran per

bulan karena penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19, masih ditemuinya juru parkir ilegal di wilayah Taman Indonesia Kaya yang menyebabkan pendapatan tidak masuk ke Dinas Perhubungan Kota Semarang, Masih ditemuinya masyarakat yang enggan membayar retribusi parkir akibat rendahnya kualitas pelayanan oleh juru parkir Taman Indonesia Kaya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan agar pengelolaan parkir dapat menjadi lebih baik lagi. Adapun saran tersebut meliputi :

1. Dalam aspek transparansi pembuatan sistem aplikasi/web yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memantau bagaimana realisasi dan target pendapatan retribusi parkir sehingga semua dapat terpantau secara *realtime* dan transparan.
2. Guna meminimalisir adanya parkir ilegal, perlu dibangunnya posko Dinas Perhubungan yang berisikan koordinator lapangan guna mengawasi berjalannya kegiatan parkir yang baik dan sesuai peraturan.
3. Dalam aspek partisipasi Dinas Perhubungan dapat memberikan pelatihan kepada juru parkir terkait memberikan pelayanan yang baik dan benar. Dengan juru parkir yang memberikan pelayanan dengan baik maka masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam membayar layanan parkir dan meminimalisir masyarakat yang enggan membayar karena pelayanan dari juru parkir yang buruk.

4. Peningkatan intensitas dalam melakukan operasi gabungan. Dari yang melakukan 3 kali dalam sebulan, dapat di tambah lagi menjadi 2 kali dalam seminggu dengan hari yang tidak selalu sama. Dengan hal tersebut maka akan meminimalisir terjadinya pelanggaran baik dari parkir sembarangan dan juru parkir illegal.